

**TEKANAN EKSTERNAL, FAKTOR POLITIK, PENGENDALIAN INTERNAL  
DAN GAYA KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI  
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Vini Zenita<sup>1</sup>**  
Universitas Riau

**Yesi Mutia Basri<sup>2</sup>**  
Universitas Riau  
i.yesimutia@yahoo.com

**Rofika<sup>3</sup>**  
Universitas Riau

***Abstract***

*This study aims to test and prove whether external pressures, political factors, internal control and leadership styles have an influence on financial reporting transparency. This research was conducted in OPD Siak district. The total population was 33 DPOs, all DPOs were sampled. The data used are primary data with a questionnaire as an instrument. Purposive sampling as a sampling method. The number of samples is 99 respondents. Respondents in this study were selected with several criteria, namely: (1) echelon II, III, IV officials who work in the Siak Regency government, (2) have a minimum work experience of 1 year, (3) financial employees who have worked for at least 1 year, because it is considered that they have experience and already know the developments in the OPD in Siak Regency. Multiple linear regression as a data analysis technique and assisted by SPSS ver.20.0 for windows. The results prove that the political factors, internal control and leadership style variables have a positive effect on financial reporting transparency. The external pressure variable has a negative effect on financial reporting transparency. The results of this study are useful for developing insights and providing in-depth understanding relating to financial reporting transparency influenced by external pressures, political factors, internal control, and leadership styles. It is also hoped that it can become a reference material for comparison information for other studies that wish to discuss this issue, and it is hoped that it will become an alternative for the government in evaluating the transparency of financial reporting, especially local governments in Siak Regency.*

***Keywords: External Pressure, Internal Control, Leadership Style, Political Factors.***

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan apakah tekanan eksternal, faktor politik, pengendalian internal dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan

di OPD kabupaten Siak. Jumlah populasi adalah sebanyak 33 OPD, seluruh OPD dijadikan sampel. Data yang digunakan merupakan data primer dengan kuesioner sebagai instrumen. Purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel, Jumlah sampel adalah 99 responden. Responden pada penelitian ini dipilih dengan beberapa kriteria, yaitu : (1) pejabat eselon II, III, IV yang bekerja di pemerintahan Kabupaten Siak, (2) memiliki pengalaman bekerja minimal bekerja 1 tahun, (3) pegawai keuangan yang sudah bekerja minimal 1 tahun, karena di nilai telah memiliki pengalaman dan sudah mengetahui perkembangan di OPD Kabupaten Siak. Regresi linear berganda sebagai teknik analisi data dan dibantu oleh SPSS ver.20.0 *for windows*. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel faktor politik, pengendalian internal dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan. Adapun variabel tekanan eksternal memiliki pengaruh negatif terhadap transparansi pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan memberikan pemahaman mendalam yang berkaitan dengan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh tekanan eksternal, faktor politik, pengendalian internal, gaya kepemimpinan. Juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi sebagai informasi bahan perbandingan bagi penelitian lain yang ingin membahas masalah ini, dan diharapkan menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam mengevaluasi transparansi pelaporan keuangan, khususnya pemerintah daerah di Kabupaten Siak.

**Kata Kunci: Faktor Politik, Gaya Kepemimpinan, Pengendalian Internal, Gaya Kepemimpinan.**

## 1. PENDAHULUAN

Implementasi *good governance* pada pemerintahan daerah menjadi suatu keharusan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* adalah dengan cara meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Munculnya kebebasan dalam aliran informasi pada proses kelembagaan diartikan adanya sebuah transparansi. Sesuai dengan Pedoman Umum *Good Public Governance (GPG)*, transparansi merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi demi terwujudnya *good public governance* (KNKG, 2010).

Untuk mewujudkan transparansi, maka Pemerintah harus menyediakan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh para pihak yang berkepentingan, baik pemerintah pusat, masyarakat maupun pihak lain. Asas transparansi ini sejalan dengan peraturan Undang-undang No. 14 tahun 2008 yang mengatur Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yaitu informasi yang sifatnya wajib disediakan lalu diumumkan secara bertahap oleh pemerintah daerah selaku badan publik adalah informasi mengenai laporan keuangan.

Presiden telah menerbitkan peraturan Presiden No. 3 tahun 2003 mengatur Kebijakan dan Strategi Nasional untuk mengembangkan *E-Government*. Pemerintah daerah diwajibkan untuk memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Selain inpres diatas, juga diterbitkan sebuah Permendagri No. 188.52/1797/SJ Tahun 2012 yang mengatur Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Regulasi atas menyebabkan pemerintah daerah diharuskan untuk memberikan transparansi yang seluas luasnya kepada masyarakat.

Di Provinsi Riau, berdasarkan penelusuran terhadap 12 website pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau didapati bahwa seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau telah memiliki website resmi dan dapat diakses. Namun demikian, hanya terdapat 4 daerah yang memiliki "Konten Transparansi Pengelolaan Anggaran" pada website resminya, yaitu: Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai. Sementara Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Siak dan Kabupaten Rokan Hilir menampilkan data terkait transparansi anggaran dalam konten yang berbeda. Selanjutnya pengamatan berdasarkan update data, seluruh website resmi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tidak ada yang melakukan update data transparansi anggaran secara berkala.

Dari seluruh dokumen anggaran yang wajib di publikasikan, hanya Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai yang telah mempublikasikan dokumen anggaran secara utuh, selebihnya Kota Pekanbaru, Kabupaten bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir hanya menampilkan beberapa dokumen anggaran, bahkan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Siak tidak sama sekali menampilkan data transparansi anggaran pada website resminya (Afandi, 2018) Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang transparansi pelaporan keuangan dimana organisasi diharuskan membuat laporan keuangan bebas salah saji material dan informasinya diketahui oleh publik yang memerlukan, terutama untuk laporan keuangan pemerintah. Pada konsep keterandalan (*reability*) dimana informasi pada laporan keuangan dapat dimengerti dan tidak terdapat kesalahan material, dan memberikan fakta yang jujur, dapat mudah diverifikasi. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa keterbukaan informasi anggaran masih merupakan sesuatu yang "langka".

Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan pada sebagian besar pemerintah daerah di provinsi Riau belum menunjukkan penerapan transparansi yang lebih baik. Kondisi ini disebabkan dalam melaksanakan proses transparansi tersebut sering dihadapkan dengan banyaknya tekanan, terutama pada tekanan eksternal. Frumkin & Galaskiewicz (2004) mengatakan bahwa tekanan eksternal mempunyai pengaruh pada tingkat kemampuan pemerintah menjadi menurun, terutama berhubungan dengan penerapan kebijakan ataupun prosedur. Hasil penelitian (Ridha & Basuki, 2012) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, Namun penelitian yang dilakukan oleh Davici (2018) menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak memiliki pengaruh pada penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selain tekanan eksternal, faktor politik juga merupakan menjadi pertimbangan atas transparansi pelaporan keuangan. Faktor politik berperan dalam membuat sebuah regulasi dan aturan didalam pemerintah (DiMaggio & Powell, 1983). Berjalan atau tidaknya implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan berpolitikan suatu negara yang mana dapat berlangsung dari lingkup internal, eksternal, resmi, maupun non resmi. Penelitian Fardian (2014) membuktikan bahwa faktor politik memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Namun pada penelitian Davici (2018) menunjukkan faktor politik tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian internal juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan. Menurut Herawati (2011) pengendalian internal yang berada dibawah dan dikendali oleh eksekutif (pemerintah daerah) bertujuan memastikan apakah strategi dijalankan dengan baik, sehingga tujuan organisasi tercapai merupakan pengertian dari pengendalian. Pada penelitian Sari (2012) menemukan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan. Sedangkan penelitian Azizah & Setiawan (2014) yang melakukan penelitiannya tentang pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian mengenai transparansi laporan keuangan pada pemerintah merupakan hal penting untuk dikaji. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktator (Khairi, 2017). Penelitian penelitian terdahulu mengenai pengaruh tekanan eksternal, faktor politik dan sistem pengendalian intern masih menunjukkan hasil yang masih bervariasi sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji kembali. Selain menggunakan ketika faktor sebelumnya penelitian ini juga menggunakan gaya kepemimpinan sebagai variabel yang mempengaruhi transparansi dalam pelaporan keuangan pada pemerintah.

Menurut House dalam (Yukl, 2010) demi organisasi yang berjalan secara efektif dan berhasil, gaya kepemimpinan atasan harus mampu memberikan pengaruh, memotivasi, dan juga membuat orang lain mampu untuk memberikan kontribusinya. Hasil penelitian Natariasari et al., (2015) menemukan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap transparansi. Namun hasil penelitian Sari et al (2017) menyatakan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Peneliti ini bertujuan untuk menguji pengaruh tekanan eksternal, faktor politik, sistem pengendalian intern dan gaya kepemimpinan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Siak. Pemilihan Pemerintah Kabupaten Siak dikarenakan Pemerintah Kabupaten Siak belum sepenuhnya menerapkan transparansi pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian ini memiliki kontribusi pada pemerintah dalam mewujudkan transparansi pelaporan keuangan.

## **2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1 Teori Agensi**

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan antar manajer pemda (kepala daerah) dan pemilih (*voter*) dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan, dimana voter adalah prinsipal dan kepala daerah adalah agen. Hubungan keagenan ini dapat menimbulkan masalah keagenan sehingga prinsipal mempunyai insentif untuk memonitor perilaku agen (Zimmerman, 1977). Pelaporan keuangan (termasuk melalui internet) merupakan sebuah upaya untuk mengurangi asimetri

informasi antara prinsipal dan agen. Prinsipal dapat menggunakan informasi akuntansi untuk memonitor kinerja agen (Kepala Daerah). Rakyat mengharuskan pemerintah agar memberikan pertanggungjawabannya terhadap pengelolaan sumber daya yang rakyat percayakan kepada pemerintah dengan mekanisme pelaporan keuangan secara periodik dan transparansi. Hal ini bertujuan untuk terciptanya transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah serta untuk mengawasi perilaku pemerintah dan menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah.

## **2.2 Pengaruh Tekanan Eksternal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Suatu dorongan dan juga sebuah penolakan agar dilaksanakannya sebuah kebijakan dari luar organisasi yaitu seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan pengertian dari tekanan eksternal. Adanya peraturan tersebut ditunjukkan untuk mengendalikan praktik yang ada agar menjadi lebih baik (Ridha & Basuki, 2012). Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah tersebut masih sulit diterapkan oleh pemerintah daerah terutama pada OPD sebagai level pelaksana. (Umaroh et al., 2017) mengatakan organisasi dituntut untuk lebih transparan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Tekanan eksternal mampu mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintah jadi menurun, terutama yang terkait pada penerapan suatu kebijakan maupun prosedur. Dengan adanya tekanan eksternal dapat berakibatkan pada praktik-praktik yang ada penelitian ini yaitu khusus penerapan transparansi pelaporan keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya tekanan eksternal mengakibatkan mampu mengganggu penerapan transparansi pelaporan keuangan yang relatif sama antara OPD yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan teori diatas, diduga bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh tekanan eksternal.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Ridha & Basuki, 2012) dan (Andriyani et al., 2016) menunjukkan bahwa tekanan eksternal memiliki pengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Berdasarkan penjelasan dan teori diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian, sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>:** Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **2.3 Pengaruh Faktor Politik terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Faktor politik merupakan kekuatan dalam mengatur dan membuat sebuah regulasi, serta aturan pemerintahan. Faktor politik juga menjadi pertimbangan atas transparansi pelaporan keuangan. Faktor politik memegang peranan penting dalam jabatan-jabatan penting di dalam struktur pemerintahan, faktor politik berperan dalam membuat sebuah regulasi dan aturan didalam pemerintah (DiMaggio & Powell, 1983).

Faktor politik berperan dalam pembuatan sebuah regulasi dan aturan di dalam pemerintahan. Penerapan transparansi laporan keuangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan diterapkannya transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah tentu akan menjadi sebuah sistem atau tata cara dalam menciptakan sebuah hasil yang akan diatur oleh regulasi, hokum, dan perda yang terkait. Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fardian (2014) menjelaskan bahwa faktor politik memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Umaroh et al., (2017) yang juga menyatakan bahwa faktor politik memiliki pengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

**H<sub>2</sub>:** *Faktor Politik memiliki pengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.*

### **2.4 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 pengendalian internal adalah suatu proses rancangan agar dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai mengenai tercapainya tujuan pemerintah daerah yang tercermin pada keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan juga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Internal kontrol ada dibawah kendali eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin apakah strategi dijalankan telah berjalan secara baik, sehingga tujuan dari organisasi tercapai merupakan pengertian dari pengendalian menurut (Rinaldi, 2013).

Sari (2012) menemukan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan dapat mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengendalian internal pemerintah yang meliputi keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan secara umum termasuk kedalam kategori baik pada pemerintah kota Cimahi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2012) menyebutkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Serta didukung pula oleh hasil penelitian yang dilakukan Natariasari et al., (2015) yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengendalian internal mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat diambil hipotesis bahwa:

**H<sub>3</sub>:** *Pengendalian Internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.*

## **2.5 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Menurut Rivai & Mulyadi (2003) gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri-ciri untuk mempengaruhi bawahan, untuk mencapai sasaran organisasi yang digunakan pimpinan atau dapat diartikan juga gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering dijalankan oleh para pemimpin. Gaya kepemimpinan menunjukkan, secara langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan seorang pimpinan terhadap kemampuan bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba memengaruhi kinerja bawahannya. Menurut House dalam (Yukl, 2010) mengatakan bahwa : Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan individu dalam mempengaruhi, mengajak, memotivasi, dan membuat orang lain mau berkontribusi demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Dari pendapat House dapat diartikan bahwa kepemimpinan merupakan cara mempengaruhi dan memotivasi orang lain agar orang tersebut mau berkontribusi untuk keberhasilan organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani et al., (2016) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan



pemerintah daerah di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan teori di atas, dapat diduga bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4:** *Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.*

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Siak yang terdiri dari 33 OPD. Dalam penelitian ini seluruh OPD dijadikan sampel. Responden pada penelitian ini dipilih dengan kriteria: 1) Pejabat eselon II, III, dan IV yang bekerja dipemerintahan Kabupaten Siak; 2) Memiliki pengalaman kerja bekerja minimal 1 tahun; 3) Pegawai keuangan yang sudah bekerja minimal 1 tahun, karena dinilai telah memiliki pengalaman & sudah mengetahui kondisi perkembangan di OPD Kabupaten siak. Responden yang diambil dari tiap-tiap untuk Organisasi Perangkat Daerah adalah sebanyak 3 orang sehingga jumlah keseluruhan responden adalah 99 orang.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data yang didapatkan ataupun diperoleh langsung dari sumber pertamanya. Data primer berupa jawaban langsung dari responden setelah kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden (Kepala OPD, Sekretaris dan Kasubbag Keuangan) di setiap OPD di Kabupaten Siak.

#### 3.2 Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Definisi Operasional Variabel**

NO	VARIABEL	DEFINISI	INDIKATOR	SKALA
	Transparansi pelaporan keuangan	cara mendapatkan informasi yang cukup, akurat dan juga informasi yang tepat waktu tentang kebijakan publik dan suatu proses pembentukan pemerintah merupakan penerapan transparansi pelaporan keuangan (Silvia, 2009)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Integritas manajemen</li><li>• Keterbukaan informasi staf yang andal</li></ul>	Likert(1-5)

NO	VARIABEL	DEFINISI	INDIKATOR	SKALA
	Tekanan eksternal	Tekanan eksternal merupakan hasil dari tekanan informal dan tekanan formal. Tekanan-tekanan tersebut dapat mempengaruhi struktur organisasi maupun kegiatan organisasi. Faktor eksternal berupa peraturan organisasi lain seperti pemerintah pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga-lembaga lain. (Ridha & Basuki, 2012).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbitnya UU dan peraturan tentang transparansi</li> <li>• Pemberitaan media masa</li> <li>• Tuntutan berbagai pihak pengguna laporan</li> </ul>	Likert(1-5)
	Faktor politik	(Fardian, 2014) menyatakan Faktor politik adalah kekuatan dalam mengatur dan membuat sebuah regulasi, yang dimana dalam hal ini faktor politik memegang peranan penting dalam jabatan-jabatan penting di dalam struktur pemerintahan yang nantinya dapat memudahkan atau menyulitkan transparansi pelaporan laporan keuangan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legitimasi, auditor pemerintah</li> <li>• Dukungan pemerintah</li> </ul>	Likert(1-5)
	Pengendalian internal	Sebuah internal kontrol dibawah kendali eksekutif (pemerintah daerah) bertujuan menjamin apakah strategi yang dijalankan telah berjalan secara baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai (Tanjung et al., 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan pengendalian</li> <li>• Penafsiran risiko</li> <li>• Aktivitas pengendalian</li> <li>• Informasi dan pemantauan</li> </ul>	Likert(1-5)
	Gaya kepemimpinan	Menurut House dalam (Yukl, 2010) : Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan individu untuk dapat mempengaruhi bawahan serta mengajak, memotivasi, dan membuat orang lain mau berkontribusi demi efektivitas dan keberhasilan organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemimpin professional</li> <li>• Komunikasi yang terbuka</li> </ul>	Likert(1-5)

### 3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi berganda (*multiple regression*) dengan menggunakan *software SPSS* versi 23. Model penelitian ini dituangkan dalam persamaan linear sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

**Keterangan:**

- Y = Variabel transparansi pelaporan keuangan
- a = Konstanta, nilai Y apabila  $X_1 = X_2 = X_3 = X_4$
- $b_1, b_2, b_3, b_4$  = Koefisien regresi linier berganda
- $X_1, X_2, X_3, X_4$  = Variabel tekanan eksternal, faktor politik, sistem pengendalian internal, dan gaya kepemimpinan.

**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Total penyebaran kuesioner adalah 99 buah kuesioner. Dari 99 kuesioner yang didistribusikan, respon yang diterima oleh peneliti sebanyak 84 buah kuesioner. Sehingga total data yang dapat yang diolah lebih lanjut adalah sebanyak 84 buah kuesioner (84,84%).

**Tabel 2**  
**Identitas Responden**

<b>Jenis Kelamin</b>	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
Laki-laki	29	35%
Perempuan	55	65%
<b>Total</b>	84	100%
<b>Jenjang Pendidikan</b>		
S1	14	16.66%
S2	63	75%
D3	7	8.33%
<b>Total</b>	84	100%
<b>Masa Kerja (Tahun)</b>		
1 - 5	5	6%
6 - 10	17	20%
11 - 15	26	31%
16 – 20	14	17%
>21	22	26%
<b>Total</b>	84	100%
<b>Jabatan</b>		
Kepala dinas	28	33,3%
Sekretaris	28	33,3%
Kepala bagian	28	33,3%
<b>Total</b>	84	100%

Sumber : Data diolah peneliti

**4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Data yang telah terkumpul dari kuesioner yang telah disebar dan ditabulasi dengan tujuan sebagai alat analisis data. Dengan menggunakan program SPSS 20 hasil

tabulasi di olah dan menghasilkan deskripsi statistic pada variabel penelitian, dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	84	14	30	24.07	3.296
X2	84	10	25	19.45	2.770
X3	84	26	50	38.11	5.111
X4	84	9	25	16.86	3.997
Y	84	14	25	19.06	2.208
Valid N (listwise)	84				

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari setiap variabel penelitian. Statistik deskriptif berkaitan dengan metode pengelompokkan, peringkasan, dan penyajian pada data dengan cara yang lebih informatif (Santosa, 2005). Data statistik lalu disajikan menggunakan tabel *statistic descriptive* dengan memaparkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*standard deviation*). *Mean* digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata dari populasi yang diperkirakan dari sampel. Sedangkan standar deviasi digunakan untuk menilai *disperse* rata-rata dari sampel. Maksimum dan minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari sampel. Semuanya diperlukan untuk melihat keseluruhan sampel yang berhasil dikumpulkan dan mencukupi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

#### 4.2 Hasil Uji Kualitas Data

Pengujian validitas dengan menggunakan *pearson correlation* dan pengujian reliabilitas menggunakan *cronbach alpha* dilihat pada tabel 4. Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat nilai *r* hitung berada diatas nilai *r* yang menunjukkan variabel valid, dan koefisien *cronbach alpha* yang nilainya lebih dari 0,60 menunjukkan bahwa keandalan (reliabilitas) instrumen. Selain itu nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya (Imam, 2011).

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

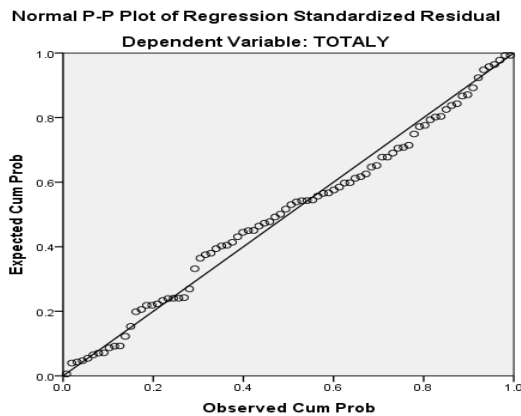
Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan	Cronbach Alpha
TEKANAN EKTERNAL (X1)	X1.1	0.750	0.2146	Valid	0,867
	X1.2	0.740	0.2146	Valid	
	X1.3	0.894	0.2146	Valid	
	X1.4	0.858	0.2146	Valid	
	X1.5	0.756	0.2146	Valid	
	X1.6	0.631	0.2146	Valid	
FAKTOR POLITIK (X2)	X2.1	0.872	0.2146	Valid	0.883
	X2.2	0.838	0.2146	Valid	
	X2.3	0.702	0.2146	Valid	
	X2.4	0.872	0.2146	Valid	
	X2.5	0.838	0.2146	Valid	
PENGENDALIAN INTERNAL (X3)	X3.1	0.805	0.2146	Valid	0.893
	X3.2	0.854	0.2146	Valid	
	X3.3	0.486	0.2146	Valid	
	X3.4	0.626	0.2146	Valid	
	X3.5	0.625	0.2146	Valid	0.893
	X3.6	0.686	0.2146	Valid	
	X3.7	0.698	0.2146	Valid	
	X3.8	0.837	0.2146	Valid	
	X3.9	0.795	0.2146	Valid	
	X3.10	0.793	0.2146	Valid	
GAYA KEPEMIMPINAN(X4)	X4.1	0.749	0.2146	Valid	0.891
	X4.2	0.900	0.2146	Valid	
	X4.3	0.866	0.2146	Valid	
	X4.4	0.868	0.2146	Valid	
	X4.5	0.784	0.2146	Valid	
TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN (Y)	Y.1	0.681	0.2146	Valid	0,653
	Y.2	0.762	0.2146	Valid	
	Y.3	0.560	0.2146	Valid	
	Y.4	0.546	0.2146	Valid	
	Y.5	0.690	0.2146	Valid	

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS

#### .4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

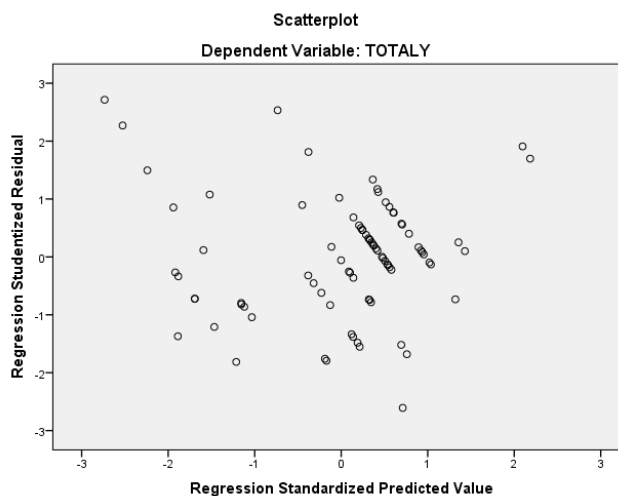
Penelitian ini melakukan pengujian normalitas dengan melihat dari *normal probability plot* (Gambar 1). Grafik p plot menunjukkan titik titik berada pada garis normal. Uji multikolinearitas ini dilakukan bertujuan menguji apakah didalam model

regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan analisis data atas model regresi, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 atau nilai  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$ . Artinya model regresi dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas.



**Gambar 1. Grafik P Plot**

Uji heteroskedastisitas dilihat pada grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Berdasarkan gambar 1 terlihat jelas titik-titik menyebar secara acak, dan tidak adanya membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0. Dapat diartikan bahwa model regresi pada penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas. Scatterplot dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber : Pengolahan data dengan SPSS, 2020

**Gambar 2 : Scatterplot**

#### 4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

**Tabel 5**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	R Square
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	1.942	1.213		1.601	0.720	0.973	1.028	
Tekanan Eksternal	0.034	0.033	0.051	1.042	0.301	0.307	3.261	
Faktor Politik	0.397	0.070	0.498	5.655	0.000	0.303	3.300	0.812
Pengendalian internal	0.194	0.038	0.450	5.079	0.000	0.962	1.039	
Gaya kepemimpinan	0.069	0.027	0.125	2.521	0.014	0.973	1.028	

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS

#### ***Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan***

Hasil pengujian hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 5. Nilai t hitung sebesar 1.042 dan nilai signifikansi 0.031 dengan perolehan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% (*2-tailed*) dengan persamaan  $n-k-1 : \alpha/2 = 84-4-1 : 0,05/2 = 79 : 0,025$  sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1,990 dimana  $n =$  jumlah sampel, dan  $k =$  jumlah variabel bebas dan 1 = nilai konstan. Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa nilai t hitung sebesar  $1.042 < 1,990$  (t tabel) dan nilai Sig sebesar  $0,301 > 0,05$ . Artinya  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima, ini menunjukkan bahwa variabel tekanan eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Tekanan berupa peraturan-peraturan pemerintah (regulasi) dan juga tekanan yang berasal dari luar organisasi adalah tekanan eksternal. Regulasi yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, mengakibatkan organisasi merubah proses dan strukturnya (Ridha & Basuki, 2012).

Apabila ditinjau dari aspek teoritis, maka hal ini bertentangan dengan teori yang ada. Sebagaimana menurut Frumkin dan Galaskiewicz yang menyatakan bahwa tekanan eksternal membuat seluruh anggota organisasi melaksanakan proses kegiatan operasional dengan semestinya, dan dilakukan dengan lebih terbuka sehingga tentu proses transparansi laporan keuangan akan mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa dengan besar atau kecilnya tekanan yang berasal dari luar

organisasi pada OPD di pemerintah Kabupaten Siak tidak memberikan pengaruh terhadap transparansi laporan keuangan tersebut. Hal ini berarti bahwa tekanan yang berasal dari luar organisasi belum mampu meningkatkan pemahaman organisasi dalam bertransformasi keperaturan yang baru, sehingga berdampak pada transparansi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tekanan eksternal tidak berpengaruh dalam transparansi pelaporan keuangan, jika tekanan eksternal meningkat atau sebaliknya menurun tidak akan dapat mempengaruhi transparansi laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi et al.,(2015) dan Sari et al., (2017), dimana hasilnya menunjukkan bahwa variabel tekanan eksternal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi laporan keuangan sehingga jika tekanan eksternal meningkat atau menurun tidak akan mempengaruhi transparansi laporan keuangan.

### ***Pengaruh Faktor Politik Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan***

Nilai t hitung sebesar 5.655 dan nilai signifikansi 0,000 dengan perolehan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% (*2-tailed*) dengan persamaan  $n-k-1 : \alpha/2 = 84-4-1 : 0,05/2 = 79 : 0,025$  sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1,990 dimana  $n =$  jumlah sampel,  $k =$  jumlah variabel bebas dan  $1 =$  nilai konstan. Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa nilai t hitung  $5,655 > 1,990$  (t tabel) dan nilai Sig  $0,00 < 0,05$ . Artinya  $H_{02}$  diterima dan  $H_{a2}$  diterima, ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(Fardian, 2014) juga menyatakan bahwa isomorfisme koersif berasal dari pengaruh politik dan dalam menciptakan transparansi pelaporan keuangan oleh organisasi publik sangat terkait dengan faktor politik di daerah organisasi tersebut, untuk menciptakan organisasi publik yang baik diperlukan peran faktor politik didalamnya, bertujuan untuk menciptakan sebuah penerapan transparansi pelaporan keuangan yang baik.

Penerapan transparansi pelaporan keuangan merupakan sebuah sistem atau tata cara dalam menciptakan sebuah hasil. Sebuah sistem pasti diatur oleh regulasi, hukum ataupun peraturan daerah yang terkait. Faktor politik berperan dalam menekankan organisasi dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan dengan cara memberikan tekanan kepada pejabat terkait organisasi tersebut dan menerapkan sebuah



kebijakan yang berguna dalam upaya penerapan transparansi keuangan (Fardian, 2014). Sedangkan menurut (Budiardjo, 2003) mengatakan bahwa politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang berhubungan dengan proses untuk menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Jadi politik ialah suatu proses dalam melaksanakan maupun dalam mencapai tujuan dari politik itu sendiri. Artinya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan negara, warganegara, kekuasaan dan segala proses yang menyertainya adalah tak lepas daripada yang namanya politik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fardian, 2014) tentang pengaruh faktor politik, ketidakpastian lingkungan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan faktor politik, ketidakpastian lingkungan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

### ***Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan***

Nilai t hitung sebesar 5.079 dan nilai signifikansi 0,000 dengan perolehan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% (*2-tailed*) dengan persamaan  $n-k-1 : \alpha/2 = 84-4-1 : 0,05/2 = 79 : 0,025$  sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1,990 dimana  $n =$  jumlah sampel,  $k =$  jumlah variabel bebas dan  $1 =$  nilai konstan. Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa nilai t hitung  $5.079 > 1,990$  (t tabel) dan nilai Sig  $0,00 < 0,05$ . Artinya  $H_{03}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak, ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Artinya apabila sistem pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan suatu daerah dapat dilakukan dan dijalankan sangat baik oleh pimpinan dan seluruh pegawai, maka akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang handal dan juga informatif, serta juga menciptakan pengamanan aset dan kepatuhan setiap instansi terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu pengendalian internal yang baik akan memberikan aturan yang baik dan jelas dalam tubuh OPD sehingga sistem yang ada didalam pengelolaan keuangan jadi lebih terstruktur dan baik. Sehingga akan tercipta transparansi keuangan daerah yang jauh lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik (rakyat) kepada pemerintah daerah. Hal ini didukung dengan kemampuan setiap pimpinan OPD untuk memberikan

pengetahuan dan sistem yang jelas serta tegas dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan (D. Sari, 2012) dimana penelitiannya membuktikan bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dengan arah yang positif.

### ***Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan***

Nilai t hitung sebesar 2.521 dan nilai signifikansi 0,014 dengan perolehan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% (*2-tailed*) dengan persamaan  $n-k-1 : \alpha/2 = 84-4-1 : 0,05/2 = 79 : 0,025$  sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1,990 dimana  $n =$  jumlah sampel,  $k =$  jumlah variabel bebas dan  $1 =$  nilai konstan. Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa nilai t hitung  $2.521 > 1,990$  (t tabel) dan nilai Sig sebesar  $0,014 < 0,05$ . Artinya  $H_{04}$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima, ini menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Artinya, hasil penelitian ini menunjukkan dengan adanya gaya kepemimpinan dalam instansi pemerintahan dapat membantu dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan, pemimpin memiliki yang kuat untuk mempengaruhi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan untuk mencapai tujuan instansi pemerintah yang dipimpinnya. (Rivai & Mulyadi, 2003) menyatakan gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri-ciri yang digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar tujuan organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh para pemimpin. Gaya kepemimpinan yang menyatakan, secara langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan seorang pimpinan terhadap kemampuan bawahannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Andriyani et al., 2016) bahwa tekanan eksternal, komitmen pimpinan, gaya kepemimpinan, dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

## **5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN**

Penelitian ini membuktikan bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Siak . Hal ini berarti bahwa tekanan yang berasal dari luar organisasi belum mampu meningkatkan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Faktor politik

berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Siak. Faktor politik berperan dalam menekankan organisasi dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh pada penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Siak. Artinya apabila sistem pengendalian internal pada proses pengelolaan keuangan suatu daerah dapat dilakukan dan dijalankan oleh pimpinan dan seluruh pegawainya dengan baik serta transparan, akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang handal dan juga informatif, dan terwujudnya pengamanan aset dan kepatuhan setiap instansi terhadap peraturan perundang-undangan di organisasi perangkat daerah kabupaten siak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Siak. Artinya gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: Peneliti ini hanya dilakukan pada pemerintah kabupaten siak sehingga tidak dapat digeneralisasi ke wilayah pemerintah lainnya. Tidak dapat memberikan secara langsung kuesioner kepada responden pada saat mengisi kuesioner. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan kantor yang membatasi upaya tersebut dan kesibukan responden. Adanya responden yang meminta waktu hingga satu sampai dengan dua minggu karena tidak dapat menjawab kuesioner secara langsung.

Penelitian selanjutnya perlu memperluas ruang lingkup penelitian bukan hanya di lingkungan satuan kerja di kabupaten siak tetapi juga termasuk, diluar lingkungan satuan kerja perangkat daerah kota pekanbarusehingga hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat diterapkan dan berlaku secara umum.

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan memberikan pemahaman mendalam yang berkaitan dengan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh tekanan eksternal, faktor politik, pengendalian internal, gaya kepemimpinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sebagai informasi bahan perbandingan bagi penelitian lain yang ingin membahas masalah ini. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam mengevaluasi transparansi pelaporan keuangan, khususnya pemerintah daerah di Kabupaten Siak.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S.A (2018) Transparansi Anggaran Masih Begitu Mahal bagi Masyarakat Riau. <https://www.riaugreen.com/view/Ruang-opini/31014/Transparansi-Anggaran-Masih-Begitu-Mahal-Bagi-Masyarakat-Riau.html#.W-rcEmExc0o,%2025%20September%202018>
- Andriyani, L., DP, E. N., & Anggraini, L. (2016). *Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Ketidakpastian Lingkungan, Gaya Kepemimpinan, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan)*. Riau University.
- Azizah, N., & Setiawan, A. R. (2014). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Serta Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal. Universitas Trunojoyo Madura*.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Davici, N. (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Pimpinan Dan Faktor Politik Terhadap Transparansi Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam). *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Dewi, N. W. S., Edy Sujana, S. E., & Sinarwati, N. K. (2015). Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 147–160.
- Fardian, D. (2014). Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris atas SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Frumkin, P., & Galaskiewicz, J. (2004). Institutional isomorphism and public sector organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 14(3), 283–307.
- Herawati, N. (2011). *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian Akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah daerah Kota Jambi* (Vol. 13). Jambi University.
- Imam, G. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Khairi, M. (2017). Peraturan Daerah Persepektif Teori Negara Hukum. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 3(1), 79–102.
- Natariasari, R., Agusti, R., & Amelia, R. (2015). *Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal dan Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan*

*Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Skpd Kota Pekanbaru)*. Riau University.

- Ridha, M. A., & Basuki, H. (2012). Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen management terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi, 15*.
- Rinaldi, U. (2013). *Kemandirian keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah*.
- Rivai, V., & Mulyadi, D. (2003). *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sari, D. (2012). *Pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah*.
- Sari, E. W., Azlina, N., & Julita, J. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu*. Riau University.
- Tanjung, A. R., Hariani, D., & Indrastuti, S. (2016). Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi KIAT, 27*(2), 51–83.
- Umaroh, U., Desmiyawati, D., & Silfi, A. (2017). *Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Etidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap penerapan transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Skpd Kabupaten Kampar)*. Riau University.
- Yukl, G. (2010). *Kepemimpinan dalam organisasi, edisi kelima*. Jakarta: PT. Indeks.
- Zimmerman, J. L. (1977). The municipal accounting maze: An analysis of political incentives. *Journal of Accounting Research, 107–144*.